

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIDESA
GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana strata satu
Bidang ilmu sosial program studi administrasi publik
Pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas islam riau*

Farid Bani Adam

NPM : 157110462

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaniirrohim.....

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian usulan penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau .

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Usulan Penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau karena memberikan dukungan dan menjadi

- motivator penulis untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
 4. Bapak Drs. Zulkifli.,M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
 5. Bapak Drs. Parjiyana.,M.Si yang juga selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
 7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi membantu penulis menyelesaikan administrasi

mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian usulan penelitian ini.

8. Kedua orang tua tercinta, Kepada Ayahanda dan Ibunda terimakasih telah memberikan dukungan materil maupun moral. Serta terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan usulan penelitian.
9. Teman-teman seangkatan program studi Administrasi Publik angkatan 2015.
10. Teman-teman kelas AP B terutama untuk para sahabat dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya yang selalu membuat hari-hari perkuliahan menjadi menyenangkan.

Semoga tuhan memberikan pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua. Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis harapan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

Pekanbaru, 18 Juni 2020

Penulis,

Farid Bani Adam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi kepustakaan.....	11
1. Konsep Administrasi.....	11

2. Konsep Organisasi	13
3. Konsep Manajemen.....	15
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	17
5. Konsep Teori Kepemimpinan	17
6. Konsep Teori Penggerakkan	21
7. Konsep Fungsi.....	22
8. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	23
9. Konsep Desa.....	25
B. Kerangka Pikir	26
C. Hipotesis	27
D. Konsep Operasional	27
E. Operasional Variabel.....	29
F. Teknik Pengukuran	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel	35
D. Teknik penarikan Sampel.....	36
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	38
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	

A. Gambaran Umum Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	39
1. Keadaan Geografis dan Penduduk	39
2. Kependudukan.....	40
3. Mata Pencarian.....	41
4. Agama	41
5. Pendidikan.....	42
6. Pemerintahan Desa.....	43
B. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	45
1. Kepala Desa	45
2. Sekretaris Desa.....	46
3. Kepala Urusan.....	47
4. Kepala Seksi.....	49
5. Kepala Kewilayahan	50
C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	50
1. Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	51
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	58
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	61

1. Jenis Kelamin.....	62
2. Tingkat Pendidikan	62
3. Usia Responden.....	63
B. Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	64
1. Pemungkinan (<i>Enabling</i>)	65
2. Penguatan (<i>Empowering</i>).....	73
3. Perlindungan (<i>Protecting</i>).....	79
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	88
BAB VI : Penutup	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR KEPUSTAKAAN	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar..	7
1.2 Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.	7
1.3 Daftar Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2018	8
II.1 Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	30
III.1 Populasi dan Sampel Penelitian pada Pemerintahan Desa Ganting Damai tentang “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	35
III.2 Populasi dan Sampel untuk Sasaran Pemberdayaan Penelitian pada Pemerintahan Desa Ganting Damai tentang “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	36
III.3 Perincian Kegiatan Penelitian Tentang “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	38
VI.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
VI.2 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	40
VI.3 Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	42
VI.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	42
VI.5 Nama-Nama Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	52
V.1 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	62

V.2	Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan Dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	62
V.3	Identitas Responden Menurut Tingkat Umur Dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	64
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Pemungkinan (Enabling) yang akan di Analisis Berdasarkan APBDes	66
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Pemungkinan (Enabling) yang akan di Analisis Berdasarkan RKPDes	69
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Penguatan (Empowering) yang akan di Analisis Berdasarkan Pengorganisasian dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa...	74
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Perlindungan (Protecting) yang akan di Analisis Berdasarkan Evaluasi	80
V.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	87

DAFTAR GAMBAR

Lampiran	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	26
IV.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	44
VI.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1	Daftar Kuisisioner (untuk responden) Penelitian Untuk Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai 96
2	Daftar Pedoman Wawancara Kepala Desa Ganting Damai dan Ketua LPM 110
3	Daftar Telly Penelitian Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar..... 114
4	Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar..... 117
5	SK Dekan Fisipol UIR Nomor : 958/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An. Farid Bani Adam 124
6	Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/26263..... 125
7	Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor : 281/E-UIR/27-FS/2019 126
8	Surat Keterangan dari Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Nomor : 474.4/SK/GD/550 127

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farid Bani Adam
NPM : 157110462
Program studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat pada penulisan ini maka dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Univeristas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komperhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2020
Pelaku pernyataan,

Farid Bani Adam

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

Abstrak

oleh

Farid Bani Adam

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Pemberdayaan, LPM

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan fungsi pemberdayaan ini dapat ditinjau melalui pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita, yaitu : Pemungkinan (Enabling), Penguatan (Empowering), dan Perlindungan (Protecting). Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, dimana data dan informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan dilapangan dan dijadikan dasar untuk menggambarkan setiap indikator dan menggali lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah penelitian dilakukan, kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan secara kuantitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian.

**IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT FUNCTIONS IN
VILLAGE DAMAI VILLAGE, SALO DISTRICT, KAMPAR DISTRICT**

Abstract

by

Farid Bani Adam

Keywords: Implementation, Empowerment Function, LPM

Community empowerment is an effort to increase the capabilities and potential of the community, so that the community can realize their identity, dignity and dignity to survive and develop themselves independently, both in the economic, social, religious and cultural fields. Community empowerment, especially in rural areas, is not enough just to increase productivity, provide equal business opportunities or provide capital, but must also be followed by changes in the socio-economic structure of the community, supporting the development of community potential through increased roles, productivity and efficiency. Therefore the purpose of this study is to analyze and identify how the implementation of the community empowerment function and what are the obstacles to the implementation of the community empowerment function in Ganting Damai Village, Salo District, Kampar Regency. The inhibiting factors in the process of implementing this empowerment function can be reviewed through community empowerment according to Kartasasmita, namely: Enabling, Empowering, and Protecting. This research method is a quantitative method. The location of this research is in Ganting Damai Village, Salo District, Kampar Regency. This type of research is a descriptive survey, where data and information collected through field observations and serve as a basis for describing each indicator and digging deeper into matters relating to the object of research. After the research is done, then grouped according to the type and type of data and added with quantitative information that is supportive in explaining the results of the study.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari ribuan pulau besar hingga pulau kecil yang didalamnya terdapat beragam suku bangsa, budaya dan bahasa dari Sabang sampai Merauke. Untuk mengatur dan mengendalikan itu semua maka dalam menyelenggarakan pemerintahannya Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagi wilayah Republik Indonesia kedalam daerah besar dan kecil, agar setiap daerah tersebut mampu melayani berbagai kepentingan masyarakat sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. Dengan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimana fungsi pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat dalam memberikan pelayanan yang bertujuan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dalam konteks sistem Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan.

Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dibawah Kecamatan merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah, kegagalan program ditingkat desa akan membawa dampak bagi kegagalan program pemerintahan diatasnya juga.

Pemerintah desa dengan masyarakat desa merupakan satu kesatuan integral yang tidak dapat terpisahkan, Meskipun secara konsep dapat dibedakan dan mengandung makna tersendiri. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang berangotakan masyarakat di desa.

arti penting dibentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan maksud dan tujuan adalah untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa demi terciptanya pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien.

Manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi adalah sangat penting. Karena tanpa Manajemen memberikan efektivitas pada usaha manusia. Fokus studi Manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan lokusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi yang akan dikembangkan. Kedua hal ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis dalam organisasi. Oleh, karena itu, penelaahan terhadap setiap fungsi manajemen umumnya

tertuju kepada peran sumber daya manusia sebagai pengguna dan pengelola sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu persoalan pengelolaan sumber daya oleh manajemen desa sangat diperlukan agar potensi-potensi desa yang ada di desa dapat di kembangkan.

Dalam memberdayakan masyarakat desa harus didasarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa dan juga oleh masyarakat itu sendiri, sehingga memungkinkan tumbuhnya ke swadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam memberdayakan masyarakat sesuai kebutuhan, dengan pelaksanaan otonomi daerah yang optimal hendaknya sejalan dengan pemberdayaan dan pembangunan. Ruang lingkup pembangunan merupakan sebuah proses perubahan seperti pendapat Siagian dalam bukunya mengemukakan bahwa pembangunan adalah serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (dalam Siagian,2014;4).

Perubahan tersebut dilakukan dengan cara berkesinambungan menuju kearah yang lebih baik, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia dan social budaya, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pemberdayaan dan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa pada pasal 1 ayat 1 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradinasional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara, Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Membina kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugas ini Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang dimana sudah jelas disebutkan dalam Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 “Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayananan masyarakat
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
3. Pengembangan kemitraaan
4. Pemberdayaan masyarakat

5. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Pemerintahan Desa tidak terlepas dari adanya campur tangan suatu Instansi/Kelembagaan. Keberhasilan pemberdayaan bukan hanya tanggung jawab dari pihak penyelenggaraan dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, tetapi juga peran masyarakat terutama dalam kerjasamanya maupun sikap tanggung jawab terhadap setiap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Desa Ganting Damai Nomor : 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pemerintah Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah Desa penyusun RKPDesa;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Ganting Damai Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2018 dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Ganting Damai dan Kepala Desa Ganting Damai yang terdapat pada Bab I Pasal 10 dan Pasal 19 tentang kewenangan desa adalah :

Pasal 10 menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa .Pasal 19 menjelaskan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kemudian berdasarkan Peraturan Desa Ganting Damai Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2018 dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Ganting Damai dan Kepala Desa Ganting Damai yang terdapat pada Bab III Pasal 4 tentang kewenangan desa adalah :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari tabel di bawah merupakan rincian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019 di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, kemudian pemerintah Desa Ganting Damai tentu membuat rencana penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk mengetahui secara rinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

2019 di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019 di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.821.318.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 530.261.320
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.052.609.250
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 92.747.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 46.670.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 48.744.570
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 147.775.000

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 2019.

Berikut dibawah ini adalah rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019

Bidang Dan Jenis Kegiatan		Biaya Dan Sumber Biaya	
Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah	Sumber
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 6.670.000	APBDesa
	2. Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 34.000.000	APBDesa
	3. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 6.000.000	APBDesa
Total Jumlah Belanja		Rp 46.670.000	APBDesa

Sumber : APBDesa 2019

Dari tabel 1.2 diatas dimana terlihat rencana kerja Pemerintah Desa Ganting Damai dalam kegiatan pemberdayaan yang direncanakan, diharapkan dari kegiatan tersebut Pemerintah Desa bisa memberdayakan potensi masyarakat serta memelihara nilai-nilai agama, adat dan budaya yang ada di Desa Ganting Damai dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan tersebut.

Selanjutnya dibawah ini adalah daftar pemberdayaan yang ada di Desa Ganting Damai yang tercantum dalam peraturan Desa APBDesa Tahun anggaran 2019 No 06 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 : Daftar Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Daftar Pemberdayaan	Volume	Jumlah	Sumber Dana
1	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber a. Upah Pengajar Menjahit	30 HOK	Rp 7.500.000	APBDesa
2	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat a. Mesin Jahit b. Bahan Pakaian c. Perlengkapan Menjahit	8 Unit 20 Stel 1 Ls	Rp 24.000.000 Rp 1.500.000 Rp 1.000.000	APBDesa APBDesa APBDesa
Total Jumlah			Rp 34.000.000	

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 2019

Melihat dari tugas dan fungsi pemerintah desa, jika dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya tersebut, sangat mungkin memberikan kontribusi yang cukup baik dalam pemberdayaan yang dilakukan di Desa Ganting Damai. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan peneliti maka dapat diperoleh penyimpangan-penyimpangan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan kenyataan yang ada hampir 50% masyarakat Desa Ganting Damai berada dalam garis kemiskinan dengan pertanian dan perikanan basis ekonominya.
2. Tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih rendah, sehingga pengetahuan dalam mengembangkan profesi masing-masing masyarakat desa sangat terbatas.
3. Dilihat dari keadaan wilayah Desa Ganting Damai berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten yang mempunyai potensi besar di segala bidang, sangat di sayangkan Desa Ganting Damai masih memiliki penduduk dengan taraf hidup rendah dengan banyak pengangguran di desa.

Dari fenomena-fenomena diatas, sekalipun bukan gambaran secara umum namun indikasi kurang terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai sudah terlihat. Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan diatas maka ditetapkan Judul penelitian ini yaitu :

“Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa kepala desa selalu memimpin di desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan memberdayakan masyarakat yang ada.

Namun bukan hanya masyarakat saja yang diberdayakan tetapi aparatur pemerintahan di desa Ganting Damai juga harus diberdayakan agar apapun yang

direncanakan bisa bersama-sama direalisasikan oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu peneliti merumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan Administrasi Desa antara teori yang dengan praktik yang sesungguhnya.
- b. Secara Akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi berupa saran atau pemikiran bagi Pemerintah Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Ilmu administrasi selalu dikaitkan dengan kegiatan kerja sama, maka jelas bahwa setiap orang yang terlibat atau melakukan kegiatan kerja sama dengan orang lain maka orang itu berhubungan dengan administrasi dan akan mengalami beberapa masalah administrasi.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2013;4) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2013;4) Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan tertentu pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Siagian (2003;2) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya Siagian (2014;4) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Admosudirjo (dalam Zulkifli, 2009;4) Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya, setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang

menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep administrasi (dalam Zulkifli, 2009;12-14) sebagai berikut :

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern, eksistensi daripada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit Administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sitemnya yang terdiri atas para manajer, staffer, dan spersonil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan secara dan melalui organisasi.
- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial tertentu yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu.
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu, yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan suatu sistem yang tertentu yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan “overall management” dari suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya dimaksud meliputi: orang-orang (man), uang (money), mesin-mesin (machines), ruang (space), tenaga atau energy (energy), dan waktu (time). Dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggungjawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Menurut Zulkifli (2009;14) unsur-unsur umum administrasi adalah:

1. Organisasi (tatakeragaan)
2. Manajemen (tatapimpinan)
3. Komunikasi (tatahubungan)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalia (tatakepegawaian)
6. Finansia (tatakeuangan)
7. Material (tatpembekalan)
8. Relasi Publik (tatahumas)

Selanjutnya Zulkifli (2009; 12) menerangkan bahwa terdapat 3 pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah defenisi konsep Administrasi tersebut.

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional.
2. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih.
3. Bahwa konsep sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Administrasi itu adalah proses kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, jadi tanpa adanya kerjasama suatu organisasi itu tidak dapat akan berjalan dengan baik.

2. Konsep Organisasi

Siagian (dalam Andry,2015;14) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Sedangkan menurut James D. Mooney (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;99) Organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya Zulkifli (2009;74) yang mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerja sama dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas penunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dan menurut Chester I. Barnard (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;99) memberikan pengertian organisasi yaitu suatu sistem aktifitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan, jadi organisasi dapat diartikan sebagai berikut :

1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu
2. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerja sama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya menurut Zulkifli (2015;99) mengatakan ada beberapa bentuk unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu :

1. Adanya tujuan bersama
2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih
3. Adanya pembagian tugas
4. Adanya kehendak untuk bekerja sama.

Sedangkan menurut Nawawi (2008;13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

1. Manusia, yaitu : yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu : manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaanya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu : kerja sama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

4. Tujuan, yaitu : organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Defenisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai perilaku dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, defenisi organisasi yangv telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerja sama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa organisasi adalah suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan ada tujuan yang sama untuk dicapai bersama.

3. Konsep Manajemen

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015;12) Manajemen didefenisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, artinya dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dipisahkan.

Menurut Mary Parker (dalam Novitasari, 2017 ;13) Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, dalam arti bahwa manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

Sedangkan Siagian (2005;5) memberikan batasan mengenai manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Atau dengan kata lain manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaan disebut manajer atau pengelola.

Selanjutnya, pengertian Manajemen menurut Manulang (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektifitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (science) dari sebagai (art).

Manajemen secara pengertian dikemukakan oleh faktor (dalam Saefullah dan Ernie Tisnawati 2012;5) adalah sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu orang lain.

Management is the getting things through people.

Menurut Nickels (dalam Saefullah dan Ernie Tisnawati 2012;6) Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Zulkifli (2005;28) bahwasanya manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Terry (2012;5) manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2010;10) yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu dan juga seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan juga masyarakat.

Menurut Saefullah dan Ernie Tisnawati (2012;194) Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

Selanjutnya Menurut Saefullah dan Ernie Tisnawati (2012;196) yang dimaksud dengan proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut.

Dari pengertian Manajemen sumber daya manusia tersebut, maka secara garis besar proses manajemen SDM dibagi kedalam lima bagian fungsi utama (dalam Saefullah dan Ernie Tisnawati, 2012;196) yaitu :

- a. Human Resource Planning. Merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan.
- b. Personel Procurement. Mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmmen, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja.
- c. Personnel Development. Mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan.
- d. Pesonnel Maintenance. Memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan, dan eselamatan tenaga kerja dan lain sebagainya.
- e. Personnel Utilization. Memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer dan juga separasi.

5. Konsep Teori Kepemimpinan

Menurut Stoner (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;207)

Kepemimpinan adalah sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan

yang berhubungan dengan tugas.

Menurut Rivai (2004;2) Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan mempengaruhi untuk mencapai tujuan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Sedangkan definisi kepemimpinan sebagai seni seperti dikemukakan George R Terry (dalam Inu Kencana, 2003;8) kepemimpinan pemerintahan sebagai seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif, ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya.

Sehubungan dengan luasnya kegiatan manusia modern pada zaman sekarang, dirasakan perlu adanya pemimpin-pemimpin yang efektif dan baik pekertinya, menurut Kartono (2008;94) mengemukakan terdapat tiga azas kepemimpinan ialah :

1. Kemanusiaan, mengutamakan sifat-sifat kepemimpinan yaitu pembimbingan manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan human.
2. Efisien, efisien teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber, materi, dan jumlah manusia atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis, serta azas-azas manajemen modern.
3. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi.

Menurut Blake dan Mouton (dalam Solihin, 2009;146) ada beberapa unsur gaya dalam kepemimpinan, antara lain sebagai berikut :

1. Gaya kepemimpinan 9,1 (*9,1 style*) yakni gaya kepemimpinan yang mengutamakan perhatian terhadap produksi dan menomorduakan perhatian terhadap manusia.
2. Gaya kepemimpinan 1,9 (*1,9 style*) yakni gaya kepemimpinan yang mengutamakan perhatian terhadap manusia dan menomorduakan perhatian terhadap produksi.
3. Gaya kepemimpinan 1,1 (*1,1 style*) yakni gaya kepemimpinan yang memiliki perhatian yang sangat kecil baik terhadap manusia maupun produksi.
4. Gaya kepemimpinan 5,5 (*5,5 style*) yakni gaya kepemimpinan yang memberikan perhatian secara moderat, baik terhadap manusia maupun produksi.

5. Gaya kepemimpinan 9,9 (9,9 style) yakni gaya kepemimpinan yang memberikan perhatian yang besar, baik terhadap manusia maupun produksi.

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam bukan diluar situasi itu.

Menurut Veithzal (2003;53) Fungsi Kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi.

Menurut Nawawi dan M. Martini Hadari (2006;74) pemimpin yang membuat keputusan dengan memperhatikan situasi sosial kelompok/organisasinya, akan dirasakan sebagai keputusan bersama yang menjadi tanggung jawab bersama pula dalam melaksanakannya.

Dalam setiap organisasi terdapat dalam tiga tingkatan kelompok jabatan pimpinan, seperti yang dikemukakan Siagian (2003;31) yaitu :

1. Manajemen puncak juga sering disebut dengan istilah Administrative Manajemen.
2. Kelompok pimpinan tingkat menengah (*middle manajement*).
3. Kelompok pimpinan tingkat bawahan yang dikenal pula dengan istilah *lover manajement, suvervisory management, gang leader, "mandor", atau Operational Management*.

Menurut Nawawi dan M. Martini Hadari (2006;74) fungsi kepemimpinan itu memiliki dua dimensi sebagai berikut :

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan menggerakkan (*Direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya.

2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*Support*) atau tugas pokok kelompok/organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemimpin.

Pemimpin yang menginginkan keberhasilan dalam mewujudkan kepemimpinannya, harus menyadari bahwa dirinya dan orang yang dipimpinnya adalah manusia. Setiap pemimpin yang memahami kekurangannya dan kelemahannya sebagai manusia, akan mampu memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya secara manusiawi.

Bennis dan Nanus (dalam Sashkin dan Molly G. Sashkin, 2011; 42-43) mengemukakan beberapa strategi-strategi kepemimpinan antara lain :

1. Kepemimpinan yang Terfokus
Tindakan-tindakan yang tampaknya dapat merebut perhatian orang, memfokuskan mereka pada isu-isu penting dalam suatu diskusi.
2. Kepemimpinan yang Komunikasi
Menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif-aktif mendengarkan, mengutamakan umpan balik yang sesuai, dan lain-lain untuk menjelaskan gagasan-gagasan yang rumit dengan jelas.
3. Kepemimpinan Kepercayaan
Prilaku-prilaku yang membangun kepercayaan adalah konsistensi tindakan (dapat diandalkan) dan pemenuhan janji.
4. Kepemimpinan Penuh Hormat
Tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa pemimpin peduli terhadap bawahan, seperti menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian yang dilakukan bawahan.
5. Kepemimpinan Berisiko
Tindakan-tindakan yang dirancang untuk mendapat komitmen penuh dari setiap sikap individu terhadap gagasan dan proyek baru, sering kali dengan melibatkan mereka dalam memberi mereka tanggung jawab.

Hasil riset Fredrick E. Fiedler (dalam Terry 2000;155) tentang kepemimpinan hanya menyumbangkan pemikiran terhadap jenis kepemimpinan ini ada tiga jenis untuk mengukur efektivitas kepemimpinan yakni :

1. Hubungan antara pemimpin yang dipimpin atau jumlah kepercayaan yang diberikan oleh bawahan kepada atasannya.

2. Tingkatan tugas-tugas bawahan, apakah berupa struktur tugas sekedar rutin.
3. Kekuasaan yang melekat pada fungsi kepemimpinan tersebut.

6. Konsep Teori Penggerakkan

Menurut Siagian (2003;106) Penggerakkan (*motivating*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Ditinjau dari segi pentingnya manusia dalam organisasi, fungsi organik penggerakkan ini merupakan fungsi yang terpenting. Malahan dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari segi filsafat administrasi dan manajemen. Fungsi organik ini merupakan fungsi yang terpenting pula, karena dalam pelaksanaan fungsi ini menjadikan manusia sebagai objek langsungnya. Istilah yang paling penting tepat dipergunakan untuk menunjukkan fungsi organik administrasi dan manajemen yang langsung menyangkut manusia-manusia didalam organisasi adalah istilah *motivating*.

Pimpinan organisasi harus selalu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memuaskan berbagai tingkat kebutuhan ini, yang sering mesti dipuaskan secara simultan. Jika pimpinan berhasil melaksanakan itu, maka telah berhasilah pimpinan tersebut mengsikronisasikan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi para anggota organisasi.

Menurut Siagian (2003,110) dalam pelaksanaan fungsi *Motivating* dalam organisasi dapat dijalankan dengan baik dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Jelaskan tujuan organisasi kepada setiap anggota organisasi.

- b. Usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut.
- c. Jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi.
- d. Jelaskan kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan.
- e. Usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi.
- f. Jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang.
- g. Tekankan pentingnya kerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan.
- h. Perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian.
- i. Berikan penghargaan serta pujian kepada karyawan yang cakap dengan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja.
- j. Yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi tujuan pribadi orang-orang tersebut tercapai semaksimal mungkin.

Kiranya menjadi jelas mengapa berhasil tidaknya pimpinan mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam arti yang sesungguhnya sangat tergantung atas kemampuannya melaksanakan fungsi *motivating* ini.

7. Konsep Fungsi

Adapun fungsi menurut Kamus lengkap Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun menurut Moenir tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Widardi tugas pokok dan fungsi merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang mewakili aspek khusus

serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur komponen dari suatu jabatan, Tugas adalah gabungan dari dua unsur atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlalu.
- b. Kejelasan dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat.
- c. Prinsip koordinasi.
- d. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- e. Kesederhanaan tidak berbelit-belit.

8. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam bahasa inggris adalah *empowerement*. Kata power dalam *empowerenment* diartikan sebagai “daya” ditambah awalan pe dan akhiran –an menjadi pemberdayaan. Daya dalam bahasaIndon esia berarti kekuasaan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Dalam ilmu sosial, terdapat berbagai defenisi dan pemahaman mengenai pemberdayaan.

Menurut Zulkarnain (2010;6) mengatakan Pemberdayaan merupakan arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan.

Selanjutnya (dalam Zubaedi, 24;2014) Pemberdayaan Masyarakat adalah

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Chambers (dalam Zubaedi 24;2014) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*.

Pengertian pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu :

- a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lainnya.
- b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan memengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite.
- c. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural deliminasi.
- d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Kartasmita (dalam Zubaedi, 79;2014) upaya pembedayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Pemungkinan (*enabling*)
Adalah menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, artinya setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi sehingga pada saat melaksanakan langkah

pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki.

2. Penguatan (*empowering*)

Adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, artinya langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan, kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya.

3. Perlindungan (*protecting*)

Melindungi masyarakat hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

9. Konsep Desa

Desa berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk kepada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Taliziduhu (1991;3) Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya setempat yang diakui dan dihormati masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

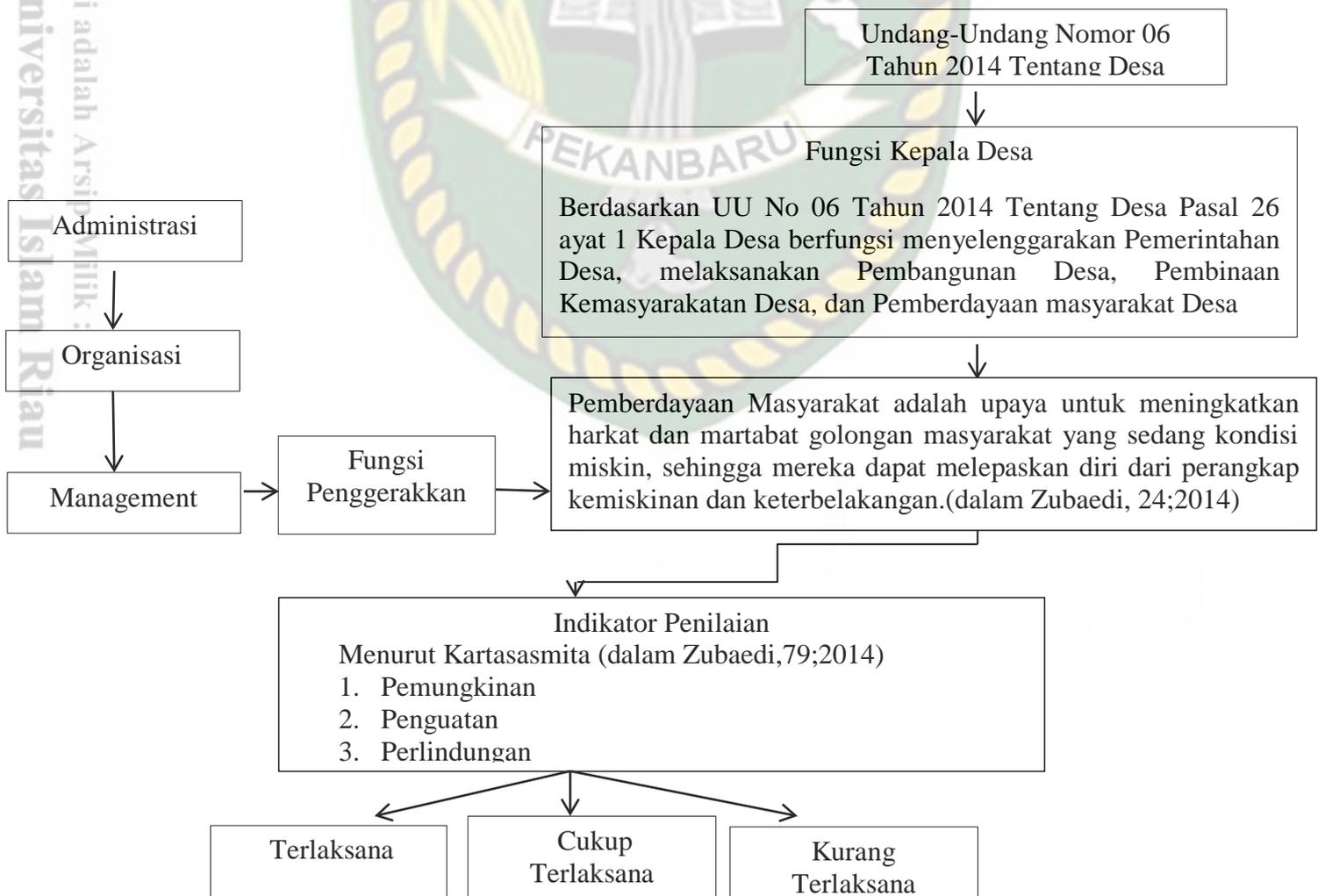
Pemerintah desa merupakan satuan organisasi terendah pemerintah yang berazaskan dekosentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepala pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Artinya pemerintahan desa terdiri dari kepala desa beserta perangkatnya (sekretaris desa, kaur dan kepala dusun) dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan pemerintah desa hanya terdiri dari kepala desa dan perangkatnya.

Dalam pasal 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung dari penduduk desa warga Republik Indonesia, dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan. Desa dipimpin oleh seseorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk setempat sedangkan Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan dan sebagai mitra pemerintahan yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat. Disamping itu kepala desa juga memiliki fungsi sebagai pelapor, penggerak, perencana, penggagas, bahkan sebagai pelaksana pembangunan didesa yang dipimpinnya.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (dalam Sugiyono, 2014;134). Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : *“Diduga Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Sudah Berjalan Dengan Baik”*.

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerja anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah diterapkan.

4. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.
5. Penggerakan adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
6. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya.
7. Pemberdayaan merupakan arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
9. Pemungkinan (*enabling*) adalah menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, artinya setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki.

10. Penguatan (*empowering*) adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, artinya langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan, kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya.
11. Perlindungan (*protecting*) Melindungi masyarakat hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.
12. Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Tabel II.1 : Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan . (dalam Zubaedi, 24;2014)	Pelaksanaan Fungsi pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	1. Pemungkinan (<i>enabling</i>)	a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang b. Memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal c. Membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural yang dapat perkembangan masyarakat d. Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Penguatan (<i>empowering</i>)	a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah b. Mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri c. Memberikan pendapat dan mendidik masyarakat	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

			<p>untuk mengelola kegiatan secara ekonomis</p> <p>d. Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik</p>	
		<p>3. Perlindungan (<i>protecting</i>)</p>	<p>a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat</p> <p>b. Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang dialami masyarakat lemah</p> <p>c. Memberikan pengawasan sampai pada tahap memetik hasil</p> <p>d. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomis.</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penelitian setiap indikator yang diteliti. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah 67-100%.
2. Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah 34-66%.
3. Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah 1-33%.

Sementara itu ukuran setiap indikator diterapkan sebagai berikut :

a. Pemungkinan

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemungkinan berada pada skala 67-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemungkinan berada pada skala 34-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemungkinan berada pada skala 1-33%.

b. Penguatan

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penguatan berada pada skala 67-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penguatan berada pada skala 34-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penguatan berada pada skala 1-33%.

c. Perlindungan

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perlindungan berada pada skala 67-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perlindungan berada pada skala 34-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perlindungan berada pada skala 1-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif dipakai untuk memecahkan sebuah masalah. Penelitian survei dipakai untuk mengumpulkan data-data untuk mengkonfirmasi mengenai populasi yang besar dengan memakai sampel yang kecil.

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif yaitu menurut Sugiyono (2014;2) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan membagikan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagaimana peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasinya, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dibuat dengan tujuan utamanya agar memberi gambaran atau deskripsi mengenai suatu situasi secara objektif.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014;35) dapat diartikan sebagai metode penelitian dilandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alasannya metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan dengan perhitungan dan interperensi yang disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel dan pengujian hipotesis sehingga memberikan hasil penelitian yang aktual.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ganting Damai, karena peneliti menemukan permasalahan-permasalahan dan kejanggalan-kejanggalan seperti kurangnya pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam pembangunan baik pembangunan fisik

dan pembangunan non fisik seta data-data yang didapat juga lebih mudah karena masih dalam ruang lingkup wilayah peneliti, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi Menurut Sugiyono (2014;148) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua LPM, Kepala Dusun, Pelatih Menjahit, Peserta Menjahit dan Masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2014;149) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

Tabel III.1. Tabel Populasi dan Sampel Penelitian pada Pemerintahan Desa Ganting Damai tentang “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupeten Kampar.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100 %
2	Sekretaris Desa	1	1	100 %
3	Bendahara Desa	1	1	100 %
4	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1	1	100%
5	Kepala Dusun	3	3	100%
6	Masyarakat	2191	19	100%
	Jumlah	2198	26	

Sumber : modifikasi penulis, Tahun 2019.

Tabel III.2. Tabel Populasi dan Sampel untuk Sasaran Pemberdayaan Penelitian pada Pemerintahan Desa Ganting Damai tentang “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Peserta Pelatihan Menjahit	10	10	100%
2	Guru/Pelatih Menjahit di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	1	1	100%
	Jumlah	11	11	100%

Sumber : modifikasi penulis, Tahun 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah teknik Sensus. Teknik sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sampel yang dijadikan sebagai responden ditentukan dengan cara mengambil keseluruhan anggota populasi yang ada, karena populasi dan sampel relatif sedikit. (Sugiyono, 2014;157)

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, angket (kuesioner) dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organisasi serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melanjutkan data dan informasi yang lebih valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.
2. Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek yakni permasalahan.
3. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyebabkan suatu daftar pernyataan yang telah ditentukan kategori jawabannya dan menyebarkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan
4. Dokumentasi adalah mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, arsip-arsip dan laporan-laporan yang di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif,

dimana setelah data yang diperlukan sudah diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kuantitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasannya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar direncanakan mulai September tahun 2018 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan seperti tertera pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Perincian Kegiatan Penelitian Tentang “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018/2019/2020																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan up																				
2	Seminar up																				
3	Perbaikan up																				
4	Revisi kuisisioner																				
5	Rekomendasi survey																				
6	Survay lapangan																				
7	Analisis data																				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)																				
9	Konsultasi revisi skripsi																				
10	Ujian konprehensif																				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
11	Revisi skripsi																				
12	Penggandaan skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

1. Keadaan Geografis dan Penduduk

Desa Ganting Damai merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Desa ini berdiri pada tanggal 22 Oktober 2001 dan Desa ini dulunya merupakan bagian dari Desa Ganting, pemekaran dilakukan karena akses yang sulit dikarenakan terhalang Sungai Kampar dan dahulu belum terdapat jembatan untuk menghubungkan kedua wilayah ini, dan pemekaran ini menghasilkan wilayah baru bernama Desa Ganting Damai.

Desa Ganting Damai memiliki luas wilayah 1860 ha dimana wilayah tersebut terbagi atas 3 Dusun yakni Dusun Sukun, Dusun Sepakat, dan Dusun Suka Maju. Tingkat pertumbuhan penduduk desa ini tergolong relatif cukup pesat, jumlah penduduk 2191 jiwa, 100% beragama Islam dan kepala keluarga sebanyak 513 KK.

Letak wilayah Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan desa Sipungguk Kecamatan Salo dengan kondisi geografis ketinggian tanah dari permukaan laut 41 Meter, suhu udara dan rata-rata 21-35 derajat Celsius dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Batu Gajah Kecamatan Tapung Hulu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ganting Kecamatan Salo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipungguk Kecamatan Salo
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

Orbitrasi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dari pusat pemerintahan Kecamatan berjarak 7 km, jarak dari Ibu Kota 15 km, Kabupaten 15 km, dan jarak dari Ibu Kota Provinsi 75 km.

2. Kependudukan

Table IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1073 Jiwa
2	Perempuan	1118 Jiwa
	Jumlah	2191 Jiwa

Sumber : Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Dari table diatas dapat dilihat berapa jumlah penduduk dari jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 1073 Jiwa lebih banyak, sedangkan jumlah dari jenis kelamin perempuan 1118 Jiwa.

Berikut tabel keadaan penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 : Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	05-06 Tahun	73 Jiwa
2	06-12 Tahun	295 Jiwa
3	12-15 Tahun	378 Jiwa
4	15-18 Tahun	176 Jiwa
5	18-60 Tahun	1130 Jiwa
6	60 Tahun Keatas	139 Jiwa
	Jumlah	2191 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Ganting Damai, Kelompok umur 05-06 Tahun dengan jumlah sebanyak 73 Jiwa, Kelompok umur 06-12 Tahun sebanyak 295 Jiwa,

Kelompok umur dari 12-15 Tahun sebanyak 378 Jiwa, Kelompok umur dari 15-18 Tahun sebanyak 176 Jiwa, Kelompok umur dari 18-60 Tahun sebanyak 1130 Jiwa, dan Kelompok umur 60 Tahun keatas itu sebanyak 139 Jiwa.

Dari tabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok umur yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada Tahun 2018 itu yang paling banyak adalah kelompok umur yang berusia 18-60 Tahun dengan jumlah 1130 Jiwa, sedangkan yang paling sedikit itu berada pada kelompok umur 05-06 Tahun yaitu sebanyak 73 Jiwa.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar itu banyak macam ragamnya, mulai dari bertani atau becocok tanam, berdagang, berkebun, nelayan, mencari batu di aliran sungai kampar dan juga ada yang merantau ke negeri tetangga yaitu Negara Malaysia. Tetapi sebagian besar mata pencaharian yang paling besar ialah bertani atau bercocok tanam, berkebun, nelayan, dan juga mencari batu dialiran Sungai Kampar. Pada Desa Ganting Damai ini peneliti cuma menemukan hanya sedikit yang berkerja sebagai PNS atau pegawai negri sipil, yang mana yang menjadi pegawai negri sipil itu hanya berjumlah 8 orang, jumlah tersebut peneliti dapatkan ketika peneliti berkunjung di Kantor Desa Ganting Damai.

4. Agama di Lokasi Penelitian

Adapun agama penduduk di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah 100% beragama Islam. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat Desa Ganting Damai adalah agama Islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini tidak terlepas dari sarana peribadatan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Ibadah penduduk Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	2
3	Taman Pendidikan Al-quran	2
4	Madrasah Diniyah Awaliyah	2
Jumlah		9

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan yaitu di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terdapat 3 tempat ibadah yaitu Masjid, Musholla ada 2, Taman Pendidikan Al-quran ada 2, dan Madrasah Diniyah Awaliyah ada 2 pula. Jadi total keseluruhan jumlah sarana ibadah di Desa Ganting Damai ada 9.

5. Pendidikan

Adapun tempat pendidikan dilokasi penelitian yaitu Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terdapat fasilitas pendidikan yang cukup memadai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	2
2	Sekolah Dasar	2
3	Madrasah Tsanawiyah Negri (MTsN)	1
Jumlah		5

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diambil penjelasan dimana pada lokasi penelitian yaitu Desa Ganting Damai terdapat sarana pendidikan yang cukup memadai, yaitu terdapat 2 buah Taman Kanak-Kanak, 2 Sekolah Dasar, dan 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN).

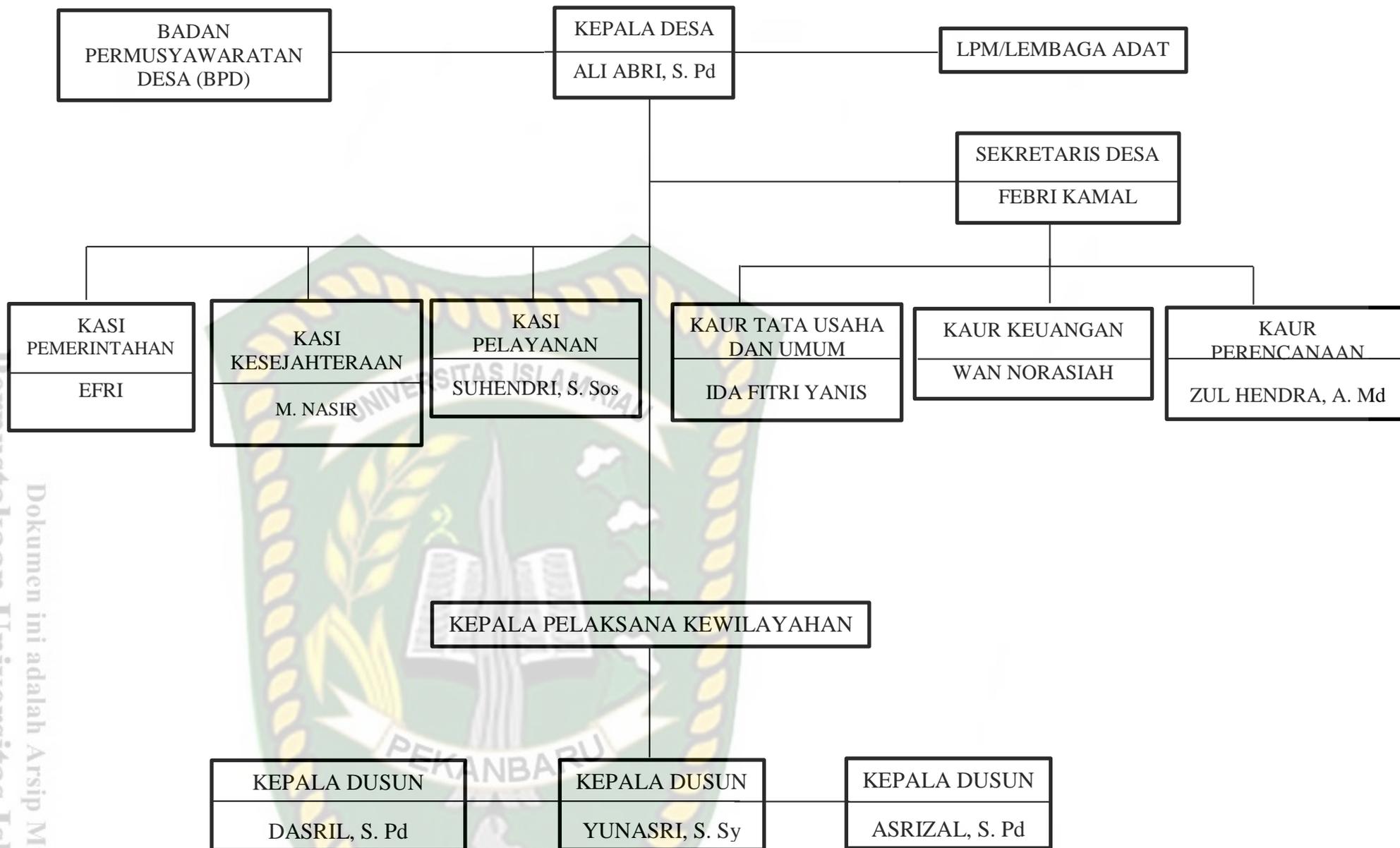
6. Pemerintah Desa

Adapun Pemerintahan Desa dilokasi penelitian ini terbagi dari 3 buah Dusun, yaitu Dusun Sukun, Dusun Suka Maju, dan Dusun Sepakat. Dimana Dusun Sukun di Kepala oleh saudara Yunasri, S,Sy, Dusun Suka Maju di Kepala oleh saudara Dasril, SPd, dan Dusun Sepakat di Kepala oleh saudara Asrizal, S.Pd.

Pemerintahan Desa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 06 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Adapun struktur Pemerintahan Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah dapat disajikan pada gambar dibawah ini :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.



Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019.

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

1. Kepala Desa

Salah satu unsur dari Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, terkait dengan fungsi dan keberadaan dari Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. Mendapat perlindungan hokum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang, tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Sekretaris Desa bekedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Berdasarkan

Pasal 7 dalam Permendagri No 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa, tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Pada Pasal 8 dalam Permendagri No 84/2016 tentang SOTK Pemerintah

Desa, itu mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Kepala urusan, dimana tugas pokok dan fungsi Kepala urusan pada desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adminisrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi

Selanjutnya adalah Kepala Seksi, pada Pasal 9 dalam Permendagri No 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa, tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Kewilayahan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Kewilayahan itu terdapat pada pasal 10 dalam Permendagri No 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi :
 - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa pengertian Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan ditingkat kelurahan.

1. Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Berdirinya suatu organisasi tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai, untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya juga dibutuhkan sumber daya manusia sebagai motor penggerak sebuah organisasi yang didirikan, dalam hal ini LPM membentuk kepengurusan untuk menjalankan roda organisasi. Berikut adalah kepengurusan LPM di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Tabel IV.5 : Nama-nama Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

No	Nama	Jabatan
1	Khairul Zikri, SE	Ketua
2	Makmur	Wakil Ketua
3	Sukarni Akhir	Wakil Ketua II
4	Azra'i	Sekretaris
5	Dedi SURIANTO	Bendahara
6	Rudi Hartono	Seksi Pembangunan, Ekonomi, Koperasi dan UKM
7	Rahmat Andika	Seksi Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Hukum
8	Bachtiar	Seksi Pendidikan dan Olahraga
9	Mastura	Seksi Peranan Perempuan
10	Fikri Auzar	Seksi Kesejahteraan Sosial
11	Yusrial	Seksi Lingkungan Hidup dan Pelestarian Lingkungan
12	Ahmad Kodim	Seksi Kesenian Budaya Adat dan Istiadat
13	Yakub	Seksi Agama

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 2019

Berdasarkan tabel IV.5 diatas, Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus LPM adalah sebagai berikut :

a. Ketua

1. Tugas Ketua :

- a. Sebagai pemimpin dan penanggung jawab LPMD
- b. merencanakan dan mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, paradigma, visi, misi untuk mengangkat citra wilayah.

- c. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna.
- d. Mengembangkan kapasitas pengelolaan pada pusat-pusat pengabdian.
- e. Melaksanakan penilaian dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan efisiensi dan akuntabilitas.
- f. Menyelenggarakan penerapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat dan akreditasi kompetensi sarana dan prasarana LPMD.
- g. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan pola organisasi dan tata kerja pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat.
- j. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan program peningkat kualitas pembinaan, pengembangan dan jaringan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Membuat program pengembangan pengabdian kepada masyarakat penerapan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsep pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah, pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan.
- l. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan Prosedur dan standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- m. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan UKM usaha kecil dan menengah serta pemerintah daerah.
- n. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sebagai katalisator pengembangan masyarakat madani.
- o. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah setempat.

2. Wewenang Ketua :

- a. Mengendalikan tenaga administrasi, sumber daya manusia, dan sumber dana yang diperlukan.
- b. Membuat budget planning terhadap kegiatan lembaga penelitian dan melakukan control.
- c. Merekomendasi dan mengajukan proposal penerapan IPTEKS kepada lembaga instansi lain yang dituju setelah dilakukan uji kaulifikasi.
- d. Melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mengangkat dan menetapkan TIM kelompok ahli dan tim penilai pengabdian kepada masyarakat.
- f. Melakukan penggalangan sumber daya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan action research atau penerapan IPTEKS yang bersinergi dengan industri, institusi pengguna serta pemerintahan pusat dan daerah.

3. Fungsi Ketua :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPMD.
- b. Membina Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan dalam kepengurusan LPMD
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi.

b. Sekretaris

1. Tugas Sekretaris

- a. Membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan menjalankan program kerja LPMD.
- b. Mengkoordinasi dan membina SDM LPMD.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan LPMD.
- d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan LPMD.
- e. Menyusun laporan semester dan tahunan kegiatan LPMD.
- f. Membuat program kerja dalam membantu merealisasikan tugas-tugas ketua.
- g. Melaksanakan urusan surat-menyurat secara intern maupun ekstern, statistik, laporan kerumahtanggaan dan melaporkan ke pimpinan secara periodik.
- h. Menggantikan posisi ketua saat tidak ada atau berhalangan.
- i. Mendokumentasikan, menyelamatkan dan merahasiakan data-data dan hal-hal lain yang dianggap penting.
- j. Menyusun jadwal program kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarkan kepada pihak-pihak terkait.
- k. Mendokumentasikan dan mengolah data-data kegiatan LPMD dalam suatu bentuk yang dapat dipahami publik.
- l. Memberikan dan menyiapkan data-data mengenai kelembagaan saat dibutuhkan oleh pimpinan, pengawas, dan pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat dan akurat.
- m. Menerbitkan jurnal dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.
- n. Menyusun proposal program kerjasama dan perluasan pengembangan penerapan IPTEKS baik ke dalam maupun keluar wilayah.
- o. Membuat sistem bank proposal pengabdian kepada masyarakat.
- p. Membuat jadwal koordinasi kegiatan pusat-pusat LPMD.
- q. Membuat jadwal koordinasi, pembinaan organisasi dan pengembangan program pusat-pusat LPMD.
- r. Membuat perencanaan program kegiatan dan anggaran dana kepada ketua LPMD.
- s. Membuat perencanaan, penyimpanan dan penyelamatan data dan investasi barang dan sumber belajar lembaga LPMD.
- t. Membuat perencanaan peralatan dan sumber belajar yang dibutuhkan.

- u. Membuat laporan setiap akhir kegiatan di lembaga LPMD kepada atasan dan pihak-pihak terkait.

2. Wewenang Sekretaris :

- a. Membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat diakses dengan mudah.
- b. Membuat sistem dokumentasi, penyelamatan dan penyebaran (publikasi).
- c. Menginformasikan kegiatan pembinaan, pengembangan dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak terkait.
- d. Membuat perencanaan program kerja dan instrumen penilaian untuk melakukan Self Evaluation lembaga dan pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat.

3. Fungsi Sekretaris :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pendataan.
- b. Menyusun rencana dan laporan yang bersifat dari seluruh seksi.
- c. Melaksanakan tugas-tugas ketua bila berhalangan.
- d. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.

c. Bendahara

1. Tugas Bendahara :

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang/ surat berharga dan barang.
- b. Membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan program kerja LPMD.
- c. Menyusun Laporan semester dan tahunan keuangan LPMD.

2. Wewenang Bendahara :

- a. Membuat sistem informasi manajemen keuangan yang dapat diakses dengan mudah.
- b. Membuat sistem dokumentasi, penyelamatan, keuangan LPMD.
- c. Membuat perencanaan keuangan LPMD.

3. Fungsi Bendahara :

- a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan keuangan.
- b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

- c. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.

d. Seksi-Seksi LPM

1. Tugas Seksi Pembangunan, Ekonomi, Koperasi dan UKM :

- a. Membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat dan bersih.
- b. Melaksanakan tata ruang desa yang teratur dan rapih
- c. Kegiatan lain yang menyangkut perumahan dan lingkungan
- d. Melaksanakan usaha/kegiatan bidang peningkatan kebersihan, keindahan dan kesehatan serta penghijauan lingkungan hidup
- e. Membuat dan mengatur pembuangan air limbah dan sampah
- f. Memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan
- g. Melaksanakan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup dan SDA
- h. Melaksanakan gerakan penghijauan, pembuatan terasiring dan saluran pengendalian dan penahan.

2. Tugas Seksi Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Hukum

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tentram.
- b. Menunjang usaha peningkatan keamanan swakarsa dengan cara mendirikan pos-pos penjagaan/ronda, memasang lampu-lampu penerangan di tempat yang rawan, membentuk kesatuan hansip dan lain-lain.
- c. Pengkoordinasian kegiatan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam, kegiatan AMD dan lain-lain.
- d. Meningkatkan kulaitas dan kuantitas keamanan.
- e. Mengikutsertakan masyarakat dalam pelatihan Hansip/ Wankamra.

3. Tugas Seksi Pendidikan dan Olahraga

- a. Melaksanakan penyuluhan untuk mengurangi arus perpindahan pemuda/ generasi muda dari desa ke kota dengan mengusahakan lapangan kerja, seperti usaha bersama di bidang pertanian, usaha bersama di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk masa depan.
- b. Membantu usaha pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dengan mengisi waktu luang untuk pengembangan bakat.
- c. Membantu mengembangkan karang taruna.
- d. Menghindarkan pemuda semaksimal mungkin dari minuman keras, narkoba, judi dan lainnya dengan menyalurkan mereka kepada kegiatan positif.

- e. Melibatkan pemuda semaksimal mungkin pada kegiatan pembangunan desa.

4. Tugas Seksi Peranan Perempuan

- a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan tentang peranan wanita sebagai ibu rumah tangga, wakil suami dan sebagai pendidik putera-puterinya.
- b. Memberikan ceramah tentang wanita karier didalam posisinya tetap sebagai ibu rumah tangga, wakil suami dan pendidik putera-puterinya didalam keluarga.
- c. Mengkoordinasi motivasi dan menggerakkan masyarakat melalui keluarga dalam rangka pelaksanaan 10 program pokok PKK dan program-program pemerintah lainnya.
- d. Mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan program-program pemerintah lainnya.
- e. Menampung aspirasi keluarga dalam rangka pembangunan.
- f. Pelaksanaan kegiatan Posyandu dan KB.
- g. Memasyarakatkan makanan sehat terutama bagi anak balita, orang sakit dan wanita hamil.
- h. Pelaksanaan cerdas tangkas, saresehan tentang keluarga bahagia dan sejahtera.
- i. Memasyarakatkan makanan non beras dengan berbagai resepnya.
- j. Kegiatan lain yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga.

5. Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan masyarakat.
- b. Menggalakan semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial.
- c. Menggalakan arisan/ gotong royong pembuatan rumah panti jompo dan tidak mampu.
- d. Memberikan latihan keterampilan dan memberikan pinjaman modal kerja bagi golongan masyarakat tidak mampu dan masyarakat tuna karya.
- e. Berusaha semaksimal mungkin secara gotong royong untuk membiayai pendidikan anak-anak sekolah yang kurang mampu.
- f. Membatasi pemborosan pesta adat di daerah agar tidak memberatkan masyarakat.
- g. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial antara lain : anak terlantar, penderita cacat fisik mental.
- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan sosial lainnya.
- i. Sumbangan kematian.

6. Tugas Seksi Lingkungan Hidup dan Pelestarian Lingkungan

- a. Membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat dan bersih.
- b. Melaksanakan tata ruang desa yang teratur dan rapih.
- c. Kegiatan lain yang menyangkut perumahan dan lingkungan.
- d. Melaksanakan usaha/kegiatan bidang peningkatan kebersihan, keindahan dan kesehatan serta penghijauan lingkungan hidup.
- e. Membuat dan mengatur pembuangan air limbah dan sampah.
- f. Memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.
- g. Melaksanakan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup dan SDA.
- h. Melaksanakan gerakan penghijauan, pembuatan terasiring dan saluran pengendalian dan penahan

7. Tugas Seksi Agama

- a. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat menyangkut usaha-usaha peningkatan kegiatan keagamaan.
- b. Penyuluhan tentang keberhasilan pembangunan melalui bahan dan pintu (jalur) keagamaan.
- c. Membantu suksesnya pelaksanaan pembinaan mental agama.
- d. Penyuluhan tentang pembudayaan hidup bersih lahir dan batin.
- e. Membantu program pembinaan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Membantu suksesnya program BP-4 dengan jalan menanamkan kesadaran kepada warga desa akan arti mulia dan sucinya perkawinan serta keluarga sejahtera.
- g. Mengisi hari raya keagamaan secara terarah, menuju kesadaran toleransi umat beragama dan peningkatan usaha-usaha pembangunan khususnya pembangunan sarana keagamaan.
- h. Mengarahkan penggunaan hasil zakat, infak dan shodaqoh serta bantuan lain untuk fakir miskin dan keperluan pembangunan serta meningkatkan sarana pendidikan sesuai dengan tuntutan agama.
- i. Kegiatan lain yang menyangkut keagamaan.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Ganteng Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Menurut Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) mempunyai tugas

membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

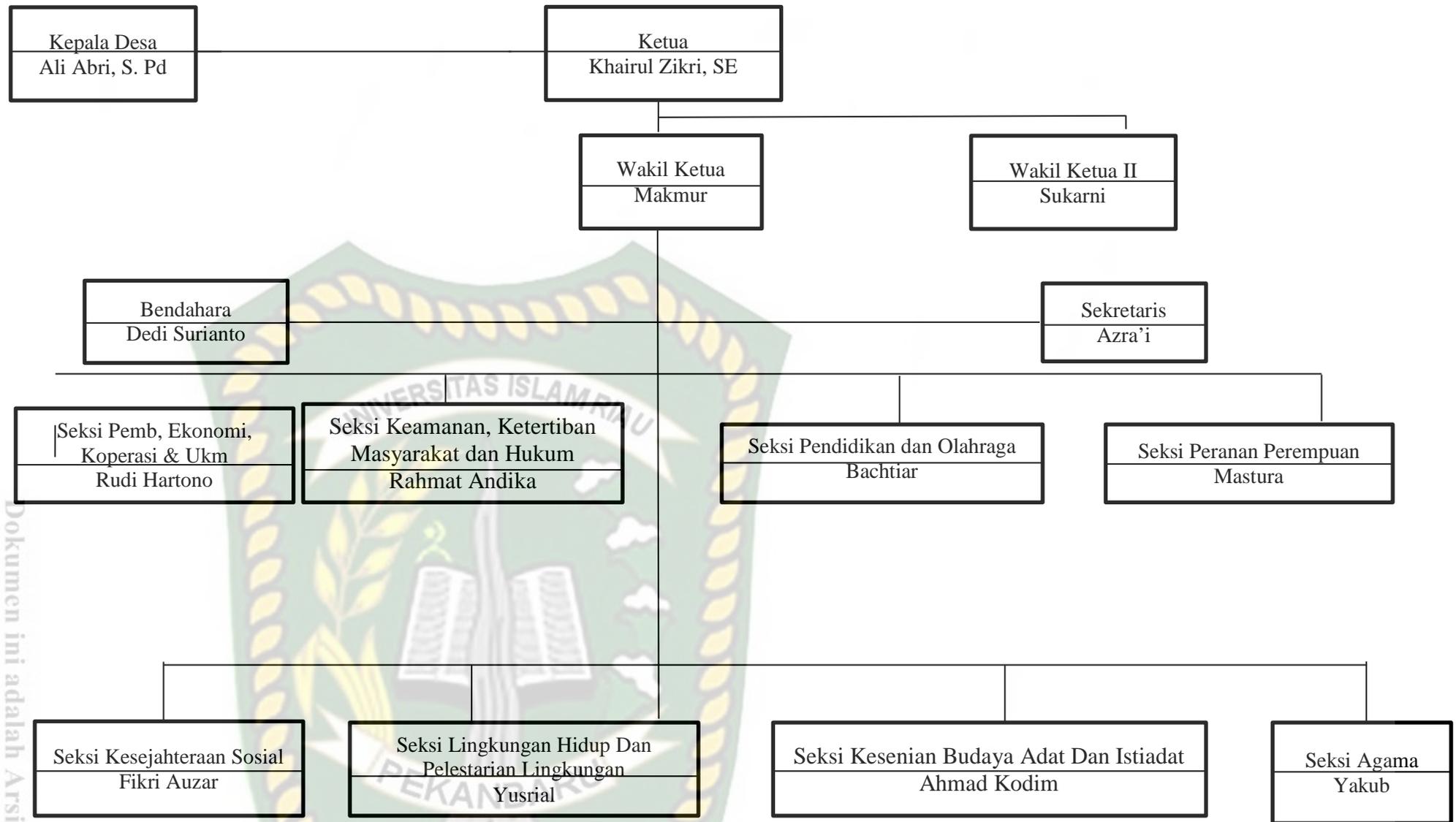
Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemabangunan yang partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Malaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Sedangkan Fungsi LPM adalah sebagai berikut :

- a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Pengggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.



Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dimana dalam pembahasan bab ini penulis melakukan dengan menggunakan teori yang ada sesuai dengan indikator variabel penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Sebelum membahas lebih jauh BAB V ini, maka terlebih dahulu ditinjau identitas responden penelitian. Responden dalam penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua LPM, Kepala Dusun, Masyarakat, Peserta Pelatihan Menjahit, dan Guru/Pelatih Menjahit.

Guna mendapatkan data yang akurat, maka penulis menentukan identitas responden dengan memperhatikan jenis kelamin, pendidikan, dan kelompok umur.

A. Identitas Responden

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengkajian tentang bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dengan demikian untuk memenuhi data yang akan dianalisa sebagai bahan informasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai tersebut maka pencari data yang akurat dari responden yang mengetahui tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut

1. Jenis Kelamin

Adapun identitas responden yang digunakan dalam penelitian ini menurut jenis kelamin seperti yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	22	59%
2	Perempuan	15	41%
	Jumlah	37	100 %

Sumber : Olahan Penulis, 2019.

Berdasarkan data jenis kelamin responden yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada tabel diatas dapat dilihat untuk responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 24 orang dengan persentasenya 59%, dan untuk responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 13 orang dengan persentasenya 41%.

2. Tingkat Pendidikan

Adapun identitas responden yang digunakan dalam penelitian ini menurut tingkat pendidikannya seperti yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	3	8%
2	SMP	9	25%
3	SMA	17	46%
4	DIII	1	2%
5	Sarjana (S.1)	7	19%
	Jumlah	37	100%

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan data tingkat pendidikan responden yang diperoleh dari

hasil penelitian seperti yang disajikan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden dengan kategori Sekolah Dasar sebanyak 3 orang dengan persentase 8%, untuk tingkat pendidikan SMP berjumlah sebanyak 9 dengan persentase 25%, untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 17 orang dengan persentase 46%, untuk tingkat pendidikan DIII berjumlah sebanyak 1 orang dengan persentase 2%, dan untuk tingkat pendidikan Sarjana S1 berjumlah sebanyak 7 orang dengan persentasenya 19%. Dengan demikian, dari 37 orang responden yang digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar responden penelitian yang digunakan yaitu sebanyak 17 orang (46%), responden dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat.

3. Usia Responden

Usia merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain.

Dan Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang harus tidak dilakukan. Seperti diketahui bahwa yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan daripada yang lebih muda, karena usia yang lebih tua sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dan luas.

Tabel V.3 : Identitas Responden Menurut Tingkat Umur dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	Kurang dari 20 Tahun	3	8%
2	20-29 Tahun	5	14%
3	30-39 Tahun	17	46%
4	40-49 Tahun	12	32%
	Jumlah	37	100%

Sumber : Olahan Penulis 2019

Berdasarkan data tingkat usia /umur responden dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa usia Kurang dari 20 Tahun itu sebanyak 3 orang dengan persentase 8%, 20-29 Tahun yaitu sebanyak 5 orang dengan persentase 14%, dan untuk umur 30-39 Tahun itu sebanyak 17 orang dengan persentase 46%, dan untuk umur 40-49 Tahun itu sebanyak 12 orang dengan persentase 32%.

B. Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, terutama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Setiap penataan dan pembangunan diperlukan ada keaktifan dan partisipasi yang baik serta keikutsertaan masyarakat agar dari masing-masing pihak dapat menyampaikan apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan dan dilaksanakan terlebih

dahulu supaya apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai dan dipenuhi oleh Pemerintah.

Setelah dilakukan observasi penelitian di Lokasi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, maka peneliti menemukan berbagai permasalahan tentang pemberdayaan masyarakat, dengan demikian diperlukan Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Dengan hal demikian, setelah mendistribusikan kuisioner kepada responden yakni Kepala Desa Ganting Damai, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua LPM, Kepala Dusun, Masyarakat, Peserta Pelatihan Menjahit dan Guru atau Pembina Menjahit. Maka hasil responden baik hasil olahan kuisioner dan wawancara akan penulis jelaskan secara berurutan perindikator yakni sebagai berikut :

1. Pemungkinan (*enabling*)

Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki.

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, maka harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat. Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa sehingga kegiatan pemberdayaan

masyarakat dilakukan dapat berkembang sesuai dengan potensi masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

Berikut ini adalah tabel responden terhadap indikator Pemungkinan (*enabling*) pada Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai.

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Pemungkinan (*enabling*) yang akan di Analisis berdasarkan APBDes.

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang	7 (19%)	22 (59%)	8 (22%)	37 (100%)
2	Memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal	7 (19%)	25 (68%)	5 (13%)	37 (100%)
3	Membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural yang dapat menghambat perkembangan masyarakat	7 (19%)	22 (59%)	8 (22%)	37 (100%)
4	Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan	11 (30%)	18 (48%)	8 (22%)	37 (100%)
Jumlah		32	87	29	148
Rata-rata		8	22	7	37
Persentase		(22%)	(59%)	(19%)	(100%)

Sumber : Olahan Penulis, 2019.

Berdasarkan pada tabel V.4 diatas dapat dilihat jawaban responden masyarakat tentang menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Bahwa responden menjawab terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentasenya 19%, kemudian cukup terlaksana menjawab sebanyak 22 orang dengan persentase 59%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 22%.

Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, hal ini menunjukkan bahwa proses Pemungkinan (*enabling*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban responden masyarakat tentang memberikan pembinaan agar dapat berkembang secara optimal, responden yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentasenya 19%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 orang dengan persentase 68%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang dengan persentase 13%.

Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal, hal ini menunjukkan bahwa proses Pemungkinan (*enabling*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik, berdasarkan indikator memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal.

Kemudian jawaban responden masyarakat tentang membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural yang dapat menghambat perkembangan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 7 orang dengan persentase 19%, kemudian yang menjawab cukup

terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 22%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural yang dapat menghambat perkembangan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa proses Pemungkinan (*enabling*) sudah diterapkan, namun belum terlaksana dengan baik.

Dan jawaban responden masyarakat tentang mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan, responden yang menjawab terlaksana sebanyak 11 orang dengan persentase 30%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 orang dengan persentase 48%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 22%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa proses Pemungkinan (*enabling*) sudah diterapkan, namun belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari jawaban responden tersebut dari indikator Pemungkinan (*enabling*) yang dianalisis berdasarkan APBDes yang telah diterapkan pada Desa Ganting Damai, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab terlaksana sebanyak 8 dengan persentase 22%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 dengan persentase 59%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 dengan persentase 19%. Maka dengan hal ini dapat menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan cukup terlaksana namun belum terlaksana dengan baik atas indikator Pemungkinan (*enabling*) yang diterapkan.

Selanjutnya berikut ini adalah tabel distribusi tanggapan responden masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari indikator Pemungkinan (*enabling*) yang akan dianalisis berdasarkan RKPDes.

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Pemungkinan (*enabling*) yang akan di Analisis berdasarkan RKPDes.

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Reponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemberdayaan melalui program dana desa	16 (43%)	15 (41%)	6 (16%)	37 (100%)
2	Tingkat pencapaian program dari LPM	8 (23%)	22 (60%)	7 (17%)	37 (100%)
3	Pencapaian terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai	11 (30%)	16 (43%)	10 (27%)	37 (100%)
Jumlah		35	53	23	111
Rata-rata		12	18	7	37
Persentase		(32%)	(49%)	(19%)	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan pada tabel V.5 diatas dapat dilihat dari jawaban responden masyarakat tentang Pemberdayaan melalui program dana desa, maka jawaban responden yang menjawab terlaksana sebanyak 16 orang dengan persentase 43%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 15 orang dengan persentase 41%, dan yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 6 orang dengan persentase 16%. Jadi rata-rata responden menjawab sudah terlaksana dalam perberdayaan melalui program dana desa, hal ini menunjukkan bahwa proses pemungkinan (*enabling*) sudah diterapkan dengan baik.

Kemudian jawaban responden masyarakat tentang Tingkat pencapaian program dari LPM, responden yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 23%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 22 orang dengan persentase 60%, dan yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 7 orang dengan persentase 17%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Tingkat pencapaian program dari LPM, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses pemungkinan (*enabling*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik, berdasarkan pertanyaan indikator yaitu tingkat pencapaian program dari LPM tersebut.

Selanjutnya adalah jawaban responden tentang Pencapaian pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai, responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 11 orang dengan persentase 30%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 16 orang dengan persentase 43%, dan yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 10 orang dengan persentase 27%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Pencapaian terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses pemungkinan (*enabling*) sudah diterapkan, namun belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari jawaban responden tersebut dari indikator Pemungkinan (*enabling*) yang dianalisis berdasarkan RKPDes yang telah diterapkan pada Desa Ganting Damai, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab terlaksana itu sebanyak 12 dengan persentase 32%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 dengan persentase 49%, dan yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 7 dengan persentase 19%. Maka dengan hal ini dapat

menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan cukup terlaksana namun belum terlaksana dengan baik atas indikator Pemungkinan (*enabling*) yang diterapkan.

Pada umumnya Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Ganting Damai sudah cukup terlaksana dari indikator Pemungkinan (*enabling*), namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator Pemungkinan (*enabling*) tentang pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat didesa dengan terlaksana dan cukup terlaksana.

Kurangnya pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat didesa ini dikarenakan banyak hal yang menjadi indikator pemicunya. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ganting Damai, yaitu bapak Ali Abri, S.Pd. (02 Oktober 2019) mengatakan :

“Saya sebagai kepala desa ganting damai telah melaksanakan program kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat didesa Ganting Damai lumayan berjalan dengan cukup baik,dalam hal ini Pemerintah Desa Ganting Damai melaksanakan program pemberdayaan dibidang keterampilan menjahit. satu fokus bidang ini melibatkan beberapa warga dengan keadaan ekonomi kurang mampu, tujuan kami agar UMKM di Desa Ganting Damai dapat berkembang dan dapat mensejahterakan individu beserta keluarga.

Selanjutnya wawancara dengan Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), bapak Khairul Zikri, SE (02 Oktober 2019) mengatakan :

“LPM di desa Ganting Damai mengajukan perencanaan yang memungkinkan pengembangan potensi masyarakat, tentu didalam pelaksanaannya ada kendala dan masalah yang dihadapi oleh LPM. banyaknya lembaga-lembaga di desa membuat pengurus LPM terbatas dalam mengambil keputusan , kemudian terbatasnya dana yang dimiliki oleh LPM menghambat langkah-langkah yang dilakukan LPM. Pemberdayaan masyarakat di desa Ganting Damai masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan pembinaan dan perhatian yang kurang dari pemerintahan desa Ganting Damai.”

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa dan juga Ketua LPM, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai yang dinilai dari indikator Pemungkinan (*enabling*) dapat disimpulkan **“Cukup Terlaksana”**. Kategori Cukup Terlaksana didapatkan berdasarkan kenyataan dilapangan, seharusnya pemerintah Desa Ganting Damai menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, namun realita yang terjadi tidak semestinya, kemudian selanjutnya kurangnya arahan dari pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat meminimalisir hasil yang dicapai masyarakat.

Hal ini terlihat dari batasan-batasan pemberdayaan hanya terpusat di bidang pendidikan, kesehatan dan agama saja. Hasil capaian pemberdayaan masyarakat di Ganting Damai di tiga bidang di atas masih belum cukup memuaskan,tergambar dari sedikitnya prestasi yang didapatkan, kemudian pembinaan pemberdayaan

masyarakat yang diberikan masih minim dan terbatasnya dana yang dimiliki oleh LPM sehingga menghambat langkah-langkah yang dilakukan oleh LPM.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan pada indikator pemungkinan, yaitu memberikan pembinaan agar masyarakat berkembang secara optimal, maka penulis menganalisa bahwa pada indikator ini belum terlaksana seluruhnya, sebaiknya pemerintah memberikan pembinaan yang maksimal kepada masyarakat dengan pendampingan dalam pemberdayaan agar kesejahteraan tersentuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, realita yang penulis temukan rata-rata masyarakat Ganting Damai masih sedikit jumlahnya dalam pengembangan potensi dimasyarakat, masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan kegiatan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seadanya, begitu juga dalam membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural yang dapat mengembangkan masyarakat berjalan dengan cukup baik, yang mana masih banyak lapisan masyarakat yang belum mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan yang ada di Desa Ganting Damai. Kemudian pencapaian program dari LPM belum sepenuhnya terlaksana, seharusnya LPM sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu menjalankan fungsinya, agar program-program kerja lembaga tersebut terlaksana terhadap masyarakat Ganting Damai.

2. Penguatan (*empowering*)

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar sera sarana prasarana lainnya.

Hasil tanggapan responden yaitu tentang pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai pada indikator Penguatan (*empowering*) yang akan dianalisis dapat dilihat pada tabel berikut ini, dari 7 item pertanyaan yang diisi 37 orang responden penelitian pada indikator Penguatan (*empowering*) yang akan dianalisis maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut ini :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Penguatan (*empowering*) yang akan di Analisis berdasarkan Pengoragnisasian dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah	3 (8%)	24 (65%)	10 (27%)	37 (100%)
2	Mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri	8 (22%)	18 (48%)	11 (30%)	37 (100%)
3	Memberikan pendapat dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis	11 (30%)	19 (51%)	7 (19%)	37 (100%)
4	Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik	8 (22%)	22 (59%)	7 (19%)	37 (100%)
5	Peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi terhadap pemberdayaan masyarakat	8 (22%)	23 (62%)	6 (16%)	37 (100%)
6	Partisipasi warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan	10 (27%)	18 (48%)	9 (25%)	37 (100%)
7	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat	8 (22%)	19 (51%)	10 (27%)	37 (100%)
Jumlah		56	143	60	259
Rata-rata		8	20	9	37
Persentase		(22%)	(54%)	(24%)	(100%)

Sumber : Olahan Penulis, 2019.

Berdasarkan pada tabel V.6 diatas dapat dilihat dari jawaban responden masyarakat tentang Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk

memecahkan masalah, bahwa responden menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 8%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 24 orang dengan persentase 65%, dan yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 10 orang dengan persentase 27%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, hal ini menunjukkan bahwa proses Penguatan (*empowering*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban responden tentang Mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 8 orang dengan persentase 22%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 18 orang dengan persentase 48%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 11 orang dengan persentase 30%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses Penguatan (*empowering*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik, berdasarkan indikator Mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Selanjutnya jawaban responden masyarakat tentang Memberikan pendapat dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis, responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 11 orang dengan persentase 30%, kemudian responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 19 orang dengan persentase 51%, dan jawaban responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 7 orang dengan persentase 19%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Memberikan pendapat dan mendidik

masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis, hal ini menunjukkan bahwa proses Penguatan (*empowering*) sudah diterapkan, namun belum terlaksana dengan baik.

Kemudian selanjutnya responden yang menjawab tentang Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik, responden yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 22%, kemudian jawaban responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 22 orang dengan persentase 59%, dan reponden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 7 orang dengan persentase 19%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses Penguatan (*empowering*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya responden yang menjawab tentang Peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi terhadap pemberdayaan masyarakat, responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 8 orang dengan persentase 22%, kemudian jawaban responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 23 orang dengan persentase 62%, dan yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 6 orang dengan persentase 16%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi terhadap pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses Penguatan (*empowering*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban responden yang menjawab tentang Partisipasi warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan, responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 10 orang dengan persentase 27%, selanjutnya jawaban

responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 18 orang dengan persentase 48%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 9 orang dengan persentase 25%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Partisipasi warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses Penguatan (*empowering*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Dan jawaban responden tentang Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 8 orang dengan persentase 22%, selanjutnya yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 19 orang dengan persentase 51%, dan jawaban responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 10 orang dengan persentase 27%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses Penguatan (*empowering*) sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari jawaban responden diatas tentang indikator Penguatan (*empowering*) yang telah diterapkan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan dianalisis berdasarkan Pengoragnisian dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Maka dapat disimpulkan rata-rata responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 8 orang dengan persentase 22%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 20 orang dengan persentase 54%, dan yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 9 orang dengan persentase 24%. Maka secara keseluruhan untuk indikator Pengutan (*empowering*) dapat disimpulkan dengan 54% pada kategori **“Cukup Terlaksana”** Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan cukup

terlaksana namun belum terlaksana dengan baik atas indikator Penguatan (*empowering*) yang diterapkan.

Pada umumnya indikator Penguatan (*empowering*) yang telah diterapkan pada Desa Ganting Damai tentang pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sudah cukup terlaksana, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam indikator Penguatan tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan item penilaian yang ada pada indikator Penguatan (*empowering*) dengan cukup terlaksana dan kurang terlaksana.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa bapak Ali Abri, S.Pd (02 Oktober 2019) mengatakan ;

“Selaku Kepala Desa terkadang saya bertukar pendapat dan mengarahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan terhadap pemberdayaan masyarakat, dan saya menjalin komunikasi dengan masyarakat walau terkadang tidak sempat mengawasi acara yang sedang berlangsung.”

Selanjutnya wawancara dengan Ketua LPM Desa Ganting Damai bapak Khairul Zikri, SE (02 Oktober 2019) mengatakan :

“Selama ini LPM turut membantu menggerakkan kegiatan kemasyarakatan, dimana hal ini akan membantu pemberdayaan sehingga dapat dikelola dengan efektif, namun kekompakan masyarakat di desa Ganting Damai kurang baik sehingga ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.”

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa dan juga

Ketua LPM, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai yang dinilai dari indikator Penguatan (*empowering*) dapat disimpulkan **“Cukup Terlaksana”**. hal ini didapatkan setelah adanya pengetahuan yang diberikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dan saling menjalin komunikasi dengan masyarakat, namun yang menjadi kendalanya yaitu kurang kompaknya masyarakat desa Ganting Damai sehingga menjadi kendala dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan pada indikator Penguatan yaitu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah masih belum maksimal, kebanyakan dari masyarakat memecahkan masalah-masalah itu hanya secara individu, mereka yang rata-rata hanya menempuh pendidikan menengah pertama hanya mencari solusi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya. Begitu juga dengan mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik, maka penulis menganalisa bahwa pada aspek ini kurangnya perhatian Pemerintah Desa Ganting Damai dalam pengelolaan pembinaan bantuan sehingga bantuan tersebut kurang difungsikan secara maksimal. Kemudian dalam memberikan pendapat dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis masih ditemukan kekurangan, yang mana secara umum pengelolaan kegiatan secara ekonomis masih berjalan secara mandiri tanpa adanya perhatian dan peran penting dari Pemerintah Desa Ganting Damai. Selanjutnya masyarakat Ganting Damai memenuhi kebutuhannya hanya secara mandiri dibebepara kegiatan masyarakat, arahan dari Pemerintah Desa pun juga belum cukup baik

terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat didalam pemberdayaan yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3. Perlindungan (*protecting*)

Hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Peran pemerintah Desa Ganting Damai dan juga dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dalam kegiatan perlindungan yaitu dengan cara tidak membeda-bedakan setiap masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu pemerintah desa ganting damai dan juga LPM juga harus melakukan program-program kegiatan pembinaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Hasil tanggapan responden pada indikator Perlindungan (*protecting*) yang akan dianalisis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Perlindungan (*protecting*) yang akan di Analisis berdasarkan Evaluasi.

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat	21 (57%)	15 (41%)	1 (2%)	37 (100%)
2	Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang dialami masyarakat lemah	17 (46%)	16 (43%)	4 (11%)	37 (100%)

3	Memberikan pengawasan pada saat memetik hasil	11 (30%)	21 (57%)	5 (13%)	37 (100%)
4	Memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomis	11 (30%)	21 (57%)	5 (13%)	37 (100%)
5	Pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat	16 (43%)	18 (49%)	3 (8%)	37 (100%)
6	Respon masyarakat terhadap pemberdayaan oleh pemerintah desa	16 (43%)	18 (49%)	3 (8%)	37 (100%)
7	Kerja sama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat	13 (35%)	20 (54%)	4 (11%)	37 (100%)
Jumlah		105	129	25	259
Rata-rata		15	18	4	37
Persentase		(40%)	(49%)	(11%)	(100%)

Sumber : *Olahan Penulis, 2019.*

Berdasarkan pada tabel V.7 diatas dapat dilihat jawaban responden masyarakat tentang Memberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dilihat dari indikator Perlindungan (protecting) dapat disimpulkan bahwa jawaban responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 21 orang dengan persentase 57%, kemudian yang responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 15 orang dengan persentase 41%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 1 orang dengan persentase 2%. Jadi rata-rata responden menjawab sudah terlaksana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa proses dari indikator Perlindungan sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik, contohnya masih ada responden yang menjawab cukup terlaksana dan kurang terlaksana.

Selanjutnya jawaban responden tentang menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang dialami masyarakat lemah, dapat disimpulkan

bahwa jawaban responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 17 orang dengan persentase 46%, kemudian responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 16 orang dengan persentase 43%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 4 orang dengan persentase 11%. Jadi rata-rata responden menjawab sudah terlaksana dalam Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang dialami masyarakat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa proses dari indikator Perlindungan sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik, contohnya masih ada responden yang menjawab cukup terlaksana dan kurang terlaksana.

Kemudian jawaban responden tentang memberikan pengawasan sampai pada tahap memetik hasil dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawaba terlaksana itu sebanyak 11 orang dengan persentase 30%, kemudian responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 21 orang dengan persentase 57%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 5 orang dengan persentase 13%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam memberikan pengawasan sampai pada tahap memetik hasil, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses dari indikator Perlindungan sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya jawaban dari responden tentang item penilaian memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomis dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 11 orang dengan persentase 30%, kemudian responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 21 orang dengan persentase 57%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 5 orang dengan persentase 13%. Jadi

rata-rata responden menjawab cukup terlaksana dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomis, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses dari indikator Perlindungan sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Kemudian jawaban dari responden tentang Pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 16 orang dengan persentase 43%, kemudian jawaban responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 18 orang dengan persentase 49%, dan jawaban responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 3 orang dengan persentase 8%. Jadi rata-rata dari jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menjawab cukup terlaksana, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses dari indikator Perlindungan sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya jawaban dari responden tentang Respon masyarakat terhadap pemberdayaan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 16 orang dengan persentase 43%, kemudian jawaban responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 18 orang dengan persentase 49%, dan jawaban responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 3 orang dengan persentase 8%. Jadi rata-rata dari jawaban responden tersebut dapat disimpulkan menjawab cukup terlaksana, hal ini dapat menunjukkan bahwa proses dari indikator Perlindungan sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik dari item penilaian Respon masyarakat terhadap pemberdayaan oleh pemerintah desa.

Dan jawaban responden tentang item penilaian Kerja sama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 13 orang dengan persentase 35%, kemudian jawaban responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 20 orang dengan persentase 54%, dan jawaban responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 4 orang dengan persentase 11%. Jadi rata-rata responden itu menjawab cukup terlaksana tentang item penilaian kerja sama pemerintah desa dengan pihak ketiga. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dari indikator Perlindungan itu sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik dinilai dari item penilaian kerja sama pemerintah desa dengan pihak ketiga.

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari ke 7 item penilaian responden yang menjawab terlaksana itu sebanyak 15 orang dengan persentase 40%, kemudian responden yang menjawab cukup terlaksana itu sebanyak 18 orang dengan persentase 49%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana itu sebanyak 4 orang dengan persentase 11%. Maka secara keseluruhan untuk indikator Perlindungan (*protecting*) dapat disimpulkan dengan 49% pada kategori **“Cukup Terlaksana”**.

Pada umumnya Perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat didesa Ganting Damai sudah cukup terlaksana, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator

Perlindungan (*protecting*) fungsi pemberdayaan masyarakat desa dengan terlaksana dan cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ganting Damai bapak Ali Abri, S.Pd (02 Oktober 2019) mengatakan :

“Sejauh ini perhatian terhadap seluruh lapisan masyarakat masih belum efektif, namun saya berusaha dalam menjalankan pemerintahan secara baik terhadap pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya seluruh elemen masyarakat belum tersentuh secara penuh oleh pemerintahan desa, seperti memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya yang bernilai ekonomis. Selanjutnya perhatian saya sebagai Kepala Desa akan saya maksimalkan agar terciptanya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.”

Selanjutnya wawancara dengan Ketua LPM bapak Khairul Zikri, SE (02 Oktober 2019) mengatakan :

“LPM tidak terlibat secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat Ganting Damai, dominasi terhadap pemberdayaan masyarakat kurang mendapatkan pengawasan secara langsung dari LPM, hal ini dikarenakan keterbelakangan pendidikan dan sosial masyarakat Ganting Damai tidak seperti daerah perkotaan yang peduli dengan urusan pemerintahan.”

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa dan juga Ketua LPM, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai yang dinilai dari indikator Perlindungan (*protecting*) dapat disimpulkan **“Cukup Terlaksana”**. hal ini didapatkan setelah wawancara dengan Kepala Desa Ganting Damai yang mengatakan bahwa Sejauh

ini perhatian terhadap seluruh lapisan masyarakat masih belum efektif, namun saya berusaha dalam menjalankan pemerintahan secara baik terhadap pemberdayaan masyarakat kata Kepala Desa Ganting Damai tersebut. Dan LPM pun juga tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Ganting Damai hal ini dikarenakan keterbelakangan pendidikan dan sosial masyarakat Ganting Damai tidak seperti daerah perkotaan yang peduli dengan urusan pemerintahan kata Ketua LPM.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan pada indikator Perlindungan yaitu, dalam memberikan pengawasan sampai pada tahap memetik hasil, penulis menganalisa bahwa masih berjalan cukup baik, dikarenakan pengawasan ini dilaksanakan tetapi tidak berkelanjutan, sehingga tidak terkoordinir dengan baik. Ketika memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomis itu hanya dibebberapa bidang saja, tapi masih banyak bidang lain yang minim perhatian dari Pemerintah Desa Ganting Damai. Kemudian sebagian bentuk diskriminasi dan dominasi yang dialami masyarakat lemah itu masih cukup terlaksana walaupun ditemukan lagi sebagian lapisan masyarakat yang masih terdiskriminasi dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Ganting Damai. Selanjutnya perlindungan kepada masyarakat lemah terhadap kelompok kuat sudah cukup terlihat, yang mana Pemerintah Desa Ganting Damai secara turun temurun itu telah memberlakukan aturan kepada para pelaku ekonomi besar, sehingga dengan adanya aturan seperti itu maka masyarakat lemah yang ada di Desa Ganting Damai itu tidak lagi tertindas oleh kelompok kuat.

Selanjutnya agar lebih tertata setiap indikator yang telah ditetapkan pada tabel beserta penjelasan per item penilaian pada halaman sebelumnya, maka peneliti rasa perlu untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil dari pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Dimana tabel dibawah ini berisikan tiga indikator lengkap dengan tingkat implementasinya dalam bentuk persentase, berikut ini rekapitulasi jawaban dari responden terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemungkinan (Enabling) dianalisis berdasarkan APBDes	8 (22%)	22 (59%)	7 (19%)	37 (100%)
2	Permungkinan (Enabling) dianalisis Berdasarkan RKPDes	12 (32%)	18 (49%)	7 (19%)	37 (100%)
3	Penguatan (Empowering)	8 (22%)	20 (54%)	9 (24%)	37 (100%)
4	Perlindungan (Protecting)	15 (40%)	18 (49%)	4 (11%)	37 (100%)
Jumlah		43	78	27	148
Rata-rata		11	19	7	37
Persentase		(30%)	(51%)	(19%)	(100%)

Sumber : Olahan Penulis, 2019.

Dari tabel V.8 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk keseluruhan indikator variabel dari Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan Terlaksana itu dengan jumlah 11 dengan persentase 30%, kemudian indikator yang menjawab Cukup Terlaksana itu dengan jumlah 19 dengan persentase 51%, dan yang menjawab Kurang Terlaksana itu dengan jumlah sebanyak 7 dengan persentasenya 19%. Dari jawaban responden tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden tersebut menganggap bahwa Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Ganting Damai sudah **“Cukup Terlaksana”** karena dalam hal ini program Pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo itu hanya ada satu bidang saja, yang mana bidang tersebut adalah Pelatihan menjahit yang diberikan kepada masyarakat, tetapi dalam pelatihan menjahit tersebut yang diberikan hanyalah ilmunya saja, tetapi setelah pelatihan menjahit tersebut telah selesai yang hanya satu bulan dilakukan pelatihan, para Pemerintahan Desa Ganting Damai Cuma melepaskan begitu saja, tanpa ada memberikan peralatan menjahit misalnya mesin jahit tersebut ataupun tidak memberikan lapangan pekerjaan bagi peserta pelatihan menjahit yang sudah ada skill dalam menjahit tersebut.

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka didapatkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai sudah cukup terlaksana, dengan 51% responden menjawab pada kategori **“Cukup Terlaksana”**. Hal ini berarti bahwa Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di desa Ganting Damai masih perlu dilakukan perbaikan agar pemberdayaan masyarakat di desa tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Dari analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut :

1. Pada indikator Pemungkinan ditemukan kendala bahwasanya fokus perhatian pemerintahan desa hanya tertuju pada satu bidang saja dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat.
2. Pada indikator Penguatan ditemukan kendala dalam hal keikutsertaan LPM sangat terbatas, serta kurang mendapat dukungan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya ketersediaan dana di LPM juga menjadi salah satu faktor penghambat, sehingga tingkat kinerja LPM tidak maksimal.
3. Pada indikator Perlindungan faktor penghambat yang ditemukan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Ganting Damai menyebabkan kurang pahamnya masyarakat didesa Ganting Damai akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan pada tiap indikator tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada indikator Pemungkinan (*Enabling*) Pemerintah desa Ganting Damai perhatiannya hanya tertuju pada beberapa bidang saja dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat sehingga kategori Cukup Terlaksana.

Dan pada indikator Penguatan (*Empowering*) dapat disimpulkan bahwa dalam hal keikutsertaan LPM itu sangat terbatas dan kurang mendapat dukungan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dan ketersediaan dana di LPM yang hanya terbatas maka pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat di desa Ganting Damai menjadi kurang efektif dan efisien sehingga kategori yang didapatkan adalah Cukup Terlaksana.

Dan pada indikator Perlindungan (*Protecting*) dapat disimpulkan masih terlihat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Ganting Damai sehingga menyebabkan kurang pahamnya masyarakat didesa Ganting Damai akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang pada desa lainnya sehingga hasil yang didapatkan berada pada kategori Cukup Terlaksana.

Faktor kendala yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar adalah sebagai berikut :

1. Pada indikator Pemungkinan ditemukan kendala bahwasanya fokus perhatian pemerintahan desa hanya tertuju pada beberapa bidang saja dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat.
2. Pada indikator Penguatan ditemukan kendala dalam hal keikutsertaan LPM sangat terbatas, serta kurang mendapat dukungan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya ketersediaan dana di LPM juga menjadi salah satu faktor penghambat, sehingga tingkat kinerja LPM tidak maksimal.
3. Pada indikator Perlindungan faktor penghambat yang ditemukan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Ganting Damai menyebabkan kurang pahamnya masyarakat didesa Ganting Damai akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Saran

Setelah dapat menyimpulkan hasil penelitian ini, maka berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti menyarankan kepada pihak terkait pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat didesa Ganting Damai antara lain sebagai berikut :

1. Saran peneliti kepada Pemerintahan Desa Ganting Damai itu sebaiknya jangan hanya tertuju pada beberapa saja dalam pemberdayaan masyarakat ini, dikarenakan jika hanya tertuju Cuma hanya pada beberapa bidang saja dalam pemberdayaan masyarakat maka akan menghasilkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat. Jadi saran peneliti pemerintah desa itu harus adil dan jangan

cuma melakukan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada bidang tertentu saja sehingga aktifitas yang dilakukan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

2. Saran kepada LPM, ketika LPM dalam hal apa pun yang mengikutsertakan LPM itu jangan hanya terbatas saja. jika demikian itu terjadi, maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didesa Ganting Damai tersebut akan tidak maksimal program pemberdaannya.
3. Selanjutnya saran peneliti untuk Pemerintahan Desa Ganting Damai itu sebaiknya dana yang diberikan kepada LPM itu sebaiknya diberikan secukup mungkin, jangan diberikan keterbatasan dana yang diberikan kepada LPM, sehingga tingkat kinerja dari LPM ini dilakukan secara maksimal mungkin.
4. Selanjutnya saran peneliti itu sebaiknya tingkat pendidikan masyarakat didesa Ganting Damai itu haruslah ditingkatkan lagi, agar pemahaman masyarakat didesa Ganting Damai akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang secara efektif dan efisien.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Atmosudirjo, S Prajudi. 2003. *Teori Administrasi*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Andry, Hendry dan Tarmizi Yussa. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Hasibuan, Melayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gadjah Mada, University press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Novitasari, Erna. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia.
- Pasalong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabefa.
- Rauf Rahyunir, Sri Maulidiah. 2016. *Badan Permuswaratan Desa*. Pekanbaru: Nusa Media.
- Siagian, Sondang P, 2005. *Manajemen Stratejik*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.

Sholihin, Ismail, 2009. *Pengantar Manajemen*. Bandung : Erlangga.

Siagian, Sondang P, 2014. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sitem Administrasi Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik edisi revisi*. Jakarta. Rineka

Cipta.

Terry, George, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan ke XIII. Jakarta. Bumi

Aksara.

Tjokkroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta :

LP3ES, 1987.

Totok, Mardikanto, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif*

Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Zubaedi, 2014. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta :

Kencana Prenadamedia Group.

Zulkarnain, 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta : Ardana

Media.

Zulkifli, dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan

Tujuh Publishing.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru :
UIR Press.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa
(KKM). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Edisi Revisi, 2013.
Pekanbaru, Universitas Islam Riau.

Dokumen :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Desa Ganting Damai Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).
4. Permendagri No 84/2016 Tentang SOTK Pemerintah Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2018 Desa Ganting Damai.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesP) Tahun 2019 Desa Ganting Damai.